

VOCATIONAL SCHOOL

Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)

Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Eko Adityo Ananto
Alfi Mufida Ahmad
Widi Septuaji

Problematika Pendidikan Vokasi Terkait Dengan Kerja Sama Dunia Usaha dan Dunia Industri

Isu Strategis

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan asset dalam pembangunan sebuah negara. Salah satu upaya penyiapan dan peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui proses pendidikan yang baik. Dari sisi kuantitas SDM, Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan negara lain khususnya anggota G-20 yaitu dalam bentuk Bonus Demografi yang berpotensi terjadi pada tahun 2030 – 2040. Berdasarkan data BPS dalam KemenkoPMK (2021), pada tahun 2020 Indonesia memiliki 70,72% atau sekitar 191,08 juta orang pada usia produktif (15 – 64 tahun). Apabila diuraikan lebih lanjut, para pakar mengelompokkan penduduk tadi berdasarkan periode tahun kelahiran dalam 4 kelompok yaitu Gen Z (usia 15-23 tahun), Gen Y (usia 24-39 tahun), Gen X (40-55 tahun), dan Baby Boomer (usia 56-64 tahun). **Struktur penduduk usia produktif didominasi oleh Gen Y sebanyak 37,23 persen atau kurang lebih 71 juta orang.**

Situasi tersebut dimungkinkan menjadi sebuah peluang atau kesempatan karena penduduk dalam golongan usia ini merupakan *talent* yang dapat dimanfaatkan tenaga dan pikirannya untuk membangun Indonesia apabila terdidik, terlatih, dan terampil (Sita Dewi dkk, 2018). Sebaliknya akan menjadi tantangan dalam bentuk pengangguran apabila mereka mempunyai produktivitas dan daya saing yang rendah dan tidak terserap dalam Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Apabila penduduk dalam usia produktif tersebut tidak bekerja dan tidak mempunyai pendapatan maka hal tersebut menjadi beban bagi negara nantinya (Suci Prasasti dan Erik Teguh Prakoso, 2020).

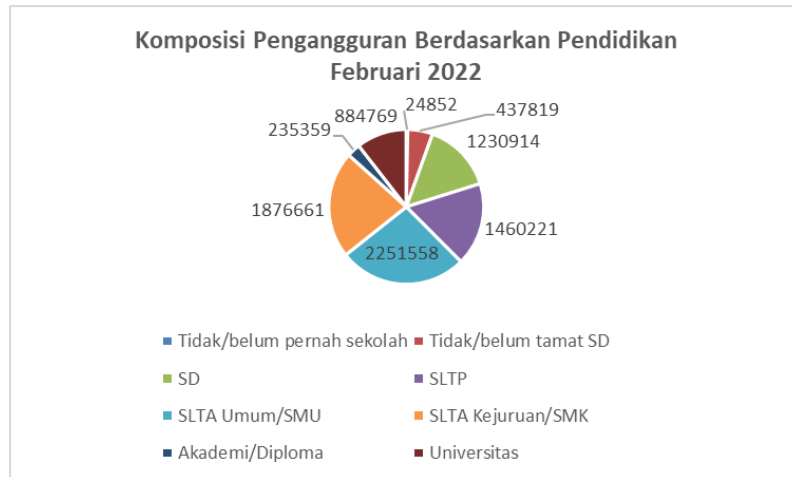
Bahwa untuk memajukan SDM yang siap untuk bekerja, Pemerintah membentuk dan menyiapkan SDM siap pakai baik dari jenjang SMK maupun Diploma melalui Pendidikan vokasi. Namun, dalam implementasinya angka **pengangguran Indonesia menurut kualifikasi pendidikan berdasarkan data BPS pada Februari tahun 2022 adalah sebanyak 8.402.153 jiwa dimana lulusan SMK/SLTA Kejuruan dan vokasi ternyata berada di peringkat kedua dengan kontribusi 25,14% (SMK 22,34% dan Diploma vokasi 2,80%)** setelah jenjang SMA dengan persentase 26,8%.

Adapun lulusan SMK/SLTA Kejuruan yang menganggur per Februari 2022 adalah sebanyak 1.876.661 orang dan untuk Diploma adalah 235.539 orang. Sedangkan untuk lulusan SMA adalah sebanyak 2.251.558 orang. Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi pada Agustus 2021 dimana dari 9.102.052 orang yang menganggur dari berbagai tingkat pendidikan lulusan SMK/SLTA Kejuruan serta Diploma berada di peringkat kedua dengan masing-masing menyumbang 2.111.338 orang dan 216.024 orang. Apabila memisahkan antara jenjang SMK/SLTA Kejuruan dengan Diploma, terlihat bahwa lebih banyak peserta didik vokasi yang menganggur dari jenjang SMK/SLTA Kejuruan dibandingkan Diploma.

2022

Komisi X

Namun, di satu sisi perlu diperhatikan pula bahwa terdapat kenaikan pengangguran sebanyak 8,3% pada jenjang diploma dari Agustus 2021 menuju ke Februari 2022.



Sumber: BPS (2022)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penyiapan tenaga vokasi masih belum optimal dan perlu mendapat perhatian penting bagi pemerintah, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 dikatakan bahwa untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing salah satu strategi yang ditetapkan adalah melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri.

Saat ini pendidikan vokasi telah melakukan revitalisasi, dimana seorang peserta didik baik pada jenjang pendidikan SMK, Diploma atau kegiatan pelatihan harus mengikuti kebutuhan dari pada DUDI baik melalui proses pembelajaran, kurikulum, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM dari tenaga pengajar/pelatih. Setelah itu peserta didik wajib mengikuti uji kompetensi yang sudah diakreditasi dan disertifikasi oleh mitra industri yang terkait. Sehingga jika peserta didik dan tenaga pengajar telah memperoleh sertifikat atas pelatihan yang diikuti dari mitra industri, maka mereka dapat melakukan program pemagangan serta lulusannya dapat bekerja dan langsung diterima pada industri tersebut (BPK, 2021).

Atas revitalisasi pendidikan vokasi, maka terdapat dua tantangan besar yang dihadapi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia, yakni menemukan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan mampu mengikuti kemajuan teknologi. Lulusan ini harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk dunia kerja saat ini, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, mempelajari teknologi baru, dan beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja.

Namun sistem pendidikan vokasi belum mampu menghasilkan lulusan yang sesuai untuk berkarir di Dunia Usaha Dunia Industri, dan lembaga pelatihan vokasi belum dikembangkan secara responsif terhadap kebutuhan industri. Akibatnya jumlah lulusan vokasi yang tidak mendapatkan pekerjaan berpotensi bertambah.

Pembahasan

Sehubungan dengan masih adanya lulusan pendidikan vokasi yang menganggur, Hal ini tidak terlepas dari dua permasalahan pokok sebagaimana diungkapkan oleh BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri Dan Dunia Kerja (2021), yakni, **pertama** terkait dengan belum optimalnya upaya pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan vokasi dalam memperoleh kerja sama dengan DUDI. Permasalahan ini terjadi karena disebabkan belum adanya pedoman/acuan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berbasis pada kerja sama industri. **Kualitas lulusan pendidikan kejuruan tidak memenuhi persyaratan dari industri.** Kompetensi lulusan dianggap tidak memadai untuk industri karena tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh industri telah meningkat. Fakta yang ada saat ini bahwa program studi masih belum memadai dan belum mencakup materi pembelajaran yang relevan untuk menghasilkan pendidikan kejuruan yang dicari oleh pemberi kerja pada sektir terkait.

Kedua, Kemendikbudristek belum optimal dalam melakukan penjaminan mutu, penyelenggaraan pendidikan vokasi. Hal ini dapat diuraikan secara lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi belum optimal dalam mendukung kebutuhan dunia kerja dan dunia kerja tidak merasakan benefit dari kerja sama dengan pendidikan vokasi;
- b. Pandemi Covid-19 yang berdampak pembatasan pertemuan pembahasan kerja sama penyelarasan kurikulum dengan dunia kerja;
- c. Kurikulum SMK dan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) belum sepenuhnya melibatkan dunia kerja dalam mendukung penguasaan karakter kerja, *soft skills*, bahasa asing, kecakapan kerja dan kewirausahaan

Selain itu berdasarkan Panja Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI, di dapatkan informasi bahwa terdapat keterbatasan pada guru kejuruan, jumlah dan kompetensi untuk tenaga pendidik dan kependidikan SMK saat ini belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan oleh DUDI. Hal ini disebabkan karena tidak mudah untuk merubah suatu pandangan bagi pendidik untuk mengikuti perkembangan DUDI. Kemudian, untuk pendidikan tingkat Diploma diketahui bahwa terbatasnya jumlah dosen yang memiliki gelar S2 sekaligus professional pada bidangnya karena pada umumnya tenaga pendidik pada jenjang Diploma adalah seorang profesional dan belum bergelar S2.

Rekomendasi

Komisi X DPR RI perlu mendorong Kemendikbudristek agar dapat menyelaraskan peraturan/kebijakan penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan peraturan presiden terkait pendidikan vokasi. Upaya tersebut diantaranya adalah:

- a. Menyusun kurikulum bersama dunia kerja yang memuat penguatan aspek soft skills dan karakter peserta didik;
- b. Melakukan pemetaan guru dan dosen vokasi beserta kompetensinya serta melaksanakan monev atas pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik vokasi sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi keahlian pendidik; dan
- c. Melakukan peningkatan kompetensi peserta didik dan pendidik melalui kerjasama dengan lembaga sertifikasi di setiap kompetensi keahlian untuk memastikan mutu peserta didik dan pendidik.

Referensi

BPK RI. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri Dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing*. Jakarta: BPK RI

BPS. (2022). *Analisis Profil Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

DPR RI. (2020). *Laporan Pania Kerja Pendidikan Vokasi Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: DPR RI

Kemendikbudristek. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kemendikbudristek RI

KemenkoPMK. (2021). *Hasil Survei Penduduk 2020 Peluang Indonesia Maksimalkan Bonus Demografi*. Diunduh Kembali dari <https://www.kemenkopmk.go.id/hasil-survei-penduduk-2020-peluang-indonesia-maksimalkan-bonus-demografi>.

Sita Dewi, Dwi Listyowati, & Bertha Elvy Napitupulu. (2018). Bonus Demografi di Indonesia : Suatu Anuegerah Atau Petaka. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting & Research* Volume 2 No.3 Agustus 2018: hal 17-23

Suci Prasasti dan Erik Teguh Prakoso. (2020). *Karakter dan Perilaku Milenial: Peluang Atau Ancaman Bonus Demografi*. *Jurnal Consilia* Volume 3 No 1 2020 : hal 10-22